

**ANALISIS YURIDIS BATAS USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN UNDANG-UNDANGAN LAINNYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR
AN. WAWAN HERMAWAN)**

ERIKA HANDAYANI

ABSTRAK

Inkonsistensi penetapan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdampak pada kepastian hukum terkait batas usia calon mempelai perempuan dalam hukum perkawinan. Batas usia 16 tahun yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Selain itu, dalam perspektif psikologi perkembangan, usia 18 tahun telah masuk kategori dewasa awal yang ditandai dengan kematangan fisik dan psikologis. Kematangan secara fisik bagi perempuan menandakan bahwa yang bersangkutan telah siap melakukan fungsi reproduksi jika telah melakukan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, apa akibat hukumnya 2. Menganalisis ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Ada disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun dan 17 tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 Tahun. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah disparitas batas umur anak dalam perundang-undangan dan diantara para hakim pun belum ada keseragaman dalam menerapkan batasan usia dewasa berikibat pada kerugian anak menyangkut pertanggungjawaban pidana si anak dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. 2. Ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi yang pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum. 2. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini lebih menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP d, karena disini berlaku *lexspecialis derogate lexgeneralis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum).

Kata Kunci : Usia, Anak, Perlindungan

**JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD AGE LIMIT IN LAW NUMBER 35
YEAR 2014 ABOUT AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 YEAR
2002 ABOUT CHILD PROTECTION AND OTHER
INVITATIONS IN INDONESIA**

**(CASE STUDY OF BOGOR DISTRICT COURT'S
DECISION WAWAN HERMAWAN)**

ERIKA HANDAYANI

ABSTRACT

*The inconsistency of determining the age of the child in the legislation in Indonesia affects the legal certainty regarding the age limit of the prospective bride in marriage law. The 16 year age limit used in the Marriage Act, is clearly contrary to the Child Protection Act which confirms the child's age limit is 18 years. In addition, in the perspective of developmental psychology, the age of 18 years has entered the early adult category characterized by physical and psychological maturity. Physical maturity for women indicates that the concerned is ready to perform reproductive function if you have done marriage. The purpose of this study is 1. Analyzing the disparity of the age limit of children in legislation, what are the legal consequences 2. Analyzing the provisions of the age limit of children under the age of child protection legislation and underage married children With the method of normative juridical research with a study approach case note that 1. There is a disparity in the age limit of children in Indonesian laws and regulations, some regulations in Indonesia are regulated differently. Some laws and regulations set the age limit of adults is 18 years and 17 years. There is also set the age limit of adults is 21 years. The resulting legal consequences are the disparity of the age limit of children in legislation and among judges there has been no uniformity in applying adult age restrictions to the detriment of the child regarding the criminal responsibility of the child and the protection of the child as a victim of a crime. 2. The age limit provisions of underage children under the laws protecting children and minors who are married must be in accordance with the case faced which in principle the diversity of limits has the same implication of providing legal protection. 2. That the police handling the criminal offense against children is more likely to place the Child Protection Act than the Criminal Code d, as it applies *lexspecialis derogate lexgeneralis* (special law provisions may override general legal provisions).*

Keywords : Age, Child, Protection